



KORAN	HAL
Haluan	13
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wako Bukittinggi Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022

BUKITTINGGI, HALUAN—Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan hantaran rancangan peraturan daerah (ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Senin (12/6).

Dalam hantarannya, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mengatakan, penyampaian ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 merupakan kewajiban tahunan bagi kepala daerah yang disam-

paikan kepada DPRD.

Dalam ranperda yang disampaikan memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari tujuh laporan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca Daerah, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

LKPD yang dimuat pada ranperda pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD 2022, juga telah disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar pada 20 Maret 2023, dan telah dilakukan pemeriksaan langsung baik secara interim maupun terinci oleh BPK RI.

"Alhamdulillah, untuk ke-10 kalinya berturut-turut, BPK RI telah memberikan opini tertinggi atas LKPD Kota Bukittinggi berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022," kata Erman Safar.

Ia menjelaskan, pendapatan

dalam LRA 2022 dianggarkan sebesar Rp714.157.721.650,00, dengan realisasi sebesar Rp698.402.386.323,22 atau mencapai 97,79 persen dari target yang telah ditetapkan.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dicapai realisasi sebesar Rp130.796.925.183,85 atau 95,99 persen. PAD yang terealisasi itu terdiri dari Pajak Daerah yang dapat direalisasikan sebesar Rp49.570.750.398,00 dari target Rp50.269.852.262,00 atau 98,61 persen.

Kemudian retribusi daerah

teralisasi sebesar Rp46.662.398.969,00 dari target sebesar Rp48.684.034.000,00, atau 95,85 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp6.641.291.925,00 dari target sebesar Rp7.505.000.000,00.

Terakhir, capaian realisasi dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar 93,70 persen atau sebesar Rp27.922.483.891,85 dari target sebesar Rp29.798.905.194.

"Untuk pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp567.387.873.682,00 atau 98,18 persen dari target sebesar Rp577.899.930.194,00. Pendapatan transfer itu terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah," ujar Erman Safar.

Terkait dengan belanja daerah, Erman Safar menyampaikan bahwa belanja daerah dikelompokkan atas empat kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. (h/tot)